

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan melakukan analisis parametric dan non parametrik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan asli daerah yang terjadi pada daerah induk setelah adanya pemekaran daerah tidak menunjukkan adanya pengaruh positif pemekaran jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD terhadap kemampuan keuangan daerah yang di ukur dengan *Wilcoxon Signed Ranks Test*, dengan nilai Z yang di dapat sebesar -0,341 dengan p value (Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0,733 dimana lebih dari batas kritis penelitian 0,05 sehingga keputusan hipotesis menerima H₀. Artinya, pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah induk setelah adanya pemekaran daerah memang menunjukkan adanya perubahan, namun perubahan tersebut tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan begitu pemekaran daerah merupakan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan pada daerah induk yang terjadi setelah adanya pemekaran, namun tidak serta merta berpengaruh signifikan terhadap kemampuan keuangan.
2. Terdapat pengaruh positif pemekaran daerah dilihat dari kontribusinya terhadap kemampuan keuangan daerah yang di ukur dengan *Paired Samples T Test*, dengan nilai signifikansi (2-tailed) yang menunjukkan hasil sebesar 0,014 lebih kecil dari nilai p value 0,05 sehingga hasil kontribusi sebelum dan sesudah pemekaran daerah mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan statistika deskriptif sebelum dan sesudah pemekaran terbukti setelah pemekaran lebih tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kontribusi (*share*) pemekaran daerah berpengaruh positif terhadap kemampuan keuangan daerah. Sehingga dapat dikatan bahwa terdapat

perubahan pengaruh PAD terhadap kemampuan keuangan daerah Induk sebelum dan sesudah pemekaran.

3. Peta kemampuan keuangan daerah setelah adanya pemekaran menunjukkan sebaran yang tidak merata, seperti:
 - a. Kuadran I yang merepresentasikan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang relative tinggi serta tingkat kontribusi PAD yang tinggi pula. Terdapat empat daerah induk pada kuadran ini, yaitu Banggai Kepulauan, Morowali, Konawe, Muna, dan Manokwari.
 - b. Kuadran II yang merepresentasikan daerah dengan tingkat kemandirian yang relative rendah, karena meski PAD nya tumbuh pesat, akan tetapi kontribusi PAD terhadap APBD-nya rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat daerah induk yang menduduki posisi tersebut.
 - c. Kuadran III yang mencerminkan kondisi daerah dengan tingkat kemandirian relative rendah, karena meski kontribusi PAD terhadap APBDnya tinggi, namun pertumbuhan PADnya rendah. Pada kuadran ini terdapat tujuh daerah induk, yaitu: Muara Enim, Musi Rawas, Lampung Barat, Ciamis, Belu, Kutai Barat, dan Kolaka.
 - d. Kuadran IV yang mencerminkan daerah dengan tingkat kemandirian yang rendah karena kontribusi PAD terhadap APBDnya rendah dan pertumbuhan PADnya juga rendah. Daerah induk yang ada pada kategori ini adalah: Mamuju, Buton, dan Kepulauan Sula.

5.2. Keterbatasan Penelitian

1. Unsur analisis dalam penelitian ini hanya memfokuskan kepada aspek-aspek keuangan daerah semata. Beberapa variabel yang sifatnya non keuangan seperti leadership pimpinan daerah, partisipasi publik, tidak menjadi dasar analisis dalam penelitian ini

2. Penelitian ini tidak memberikan gambaran secara rinci sektor PAD dan belanja daerah, sehingga tidak diketahui dari mana saja pendapatan yang diterima oleh daerah yang memberikan kontribusi pada PAD dan juga pada penelitian ini tidak diketahui belanja daerah mana saja yang menghasilkan PAD bagi daerah.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak memfokuskan kepada aspek-aspek keuangan daerah saja, namun juga memperhatikan aspek yang sifatnya non keuangan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggambarkan secara rinci PAD dan belanja daerah, sehingga dapat diketahui dari mana saja pendapatan yang diterima oleh daerah yang memberikan kontribusi pada PAD dan juga dapat diketahui belanja daerah mana saja yang menghasilkan PAD bagi daerah.
3. Daerah induk harus mampu melihat peluang jika akan melakukan pemekaran, agar kemampuan keuangan yang dihasilkan dapat meningkat dan dalam kondisi yang baik sehingga dapat dirasakan manfaat dari pemekaran daerah tersebut baik dalam Pendapatan Asli Daerah begitu pula dalam Kemampuan Keuangan daerah.